

NERACA PERDAGANGAN DAN STRUKTUR EKSPOR INDONESIA

13

Rasbin

Abstrak

Surplus neraca perdagangan Indonesia (NPI) tahun 2022 merupakan nilai paling tinggi dalam sejarah Indonesia, mencapai US\$54,46 miliar. Tulisan ini mengkaji upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga sustainabilitas surplus NPI dan mengubah struktur ekspor Indonesia. Setidaknya, ada dua cara untuk menjaga sustainabilitas surplus NPI tahun 2023, yakni Indonesia harus (1) melakukan diversifikasi pasar ekspor, dan (2) memperkuat peran trade intelligence, khususnya atase perdagangan di luar negeri. Dalam jangka panjang, untuk meningkatkan nilai ekspor sekaligus mengubah struktur ekspor, Indonesia harus mengimplementasikan kebijakan hilirisasi. Agar diversifikasi ekspor dan penguatan trade intelligence dapat menjaga surplus NPI, DPR RI melalui Komisi VI perlu mendorong Kementerian Perdagangan untuk mengimplementasikan kedua langkah tersebut. Selain itu, DPR RI melalui Komisi VII perlu mendorong Kementerian Perindustrian untuk secepatnya mengimplementasikan hilirisasi 21 komoditas prioritas, serta mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengembangkan sumber daya mineral dan energi terbarukan guna mendukung keberhasilan proses hilirisasi.

Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, surplus neraca perdagangan Indonesia (NPI) tahun 2022 merupakan nilai paling tinggi, mencapai US\$54,46 miliar. Surplus NPI ini mengalami kenaikan sebesar 53,74% (*year-on-year*, *y-on-y*) dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar US\$35,42 miliar (BPS, 2023). Kinerja NPI yang baik ini dicapai saat ekonomi dunia masih diselimuti ketidakpastian akibat Perang Rusia-Ukraina dan pandemi Covid-19. NPI yang surplus tersebut menopang ketahanan eksternal Indonesia.

Dari sektor impor, sekitar 82,98% atau US\$197,11 miliar impor Indonesia tahun 2022 adalah produk-produk nonmigas. Dibandingkan tahun 2021, nilai impor produk nonmigas tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 15,5% (*y-on-y*). Selain itu, impor Indonesia tahun 2021 dan 2022 masih didominasi oleh golongan bahan baku atau penolong masing-masing sekitar 75,12% dan 76,34% (BPS, 2023). Tingginya porsi impor golongan bahan baku atau penolong mengindikasikan naiknya aktivitas ekonomi di sektor riil. Ini disebabkan industri manufaktur di Indonesia



sebagian besar bahan bakunya adalah barang impor. Hal tersebut juga tercermin dari rata-rata *Prompt Manufacturing Index*-Bank Indonesia (PMI-BI) tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 50,09% dan 52,29%. Ini menunjukkan, kinerja sektor industri manufaktur masih tetap kuat dan berada pada fase ekspansi (indeks PMI-BI > 50%) (BI, 2023). Fakta-fakta ini memperlihatkan, aktivitas ekonomi di sektor riil tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021.

Sejalan sektor impor, sektor ekspor tahun 2022 juga mengalami kenaikan dibandingkan 2021. Nilai ekspor tahun 2022 naik 26,07% (y-on-y) menjadi US\$291,98 miliar terdiri dari ekspor migas sebesar US\$16,02 miliar sedangkan ekspor nonmigas sebesar US\$275,96 miliar. Dua komoditas yang mendominasi ekspor Indonesia tahun 2022 adalah bahan bakar mineral (HS 27) dan lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) masing-masing 19,92% dan 12,76% (BPS, 2023). Kedua jenis komoditas ekspor tersebut merupakan produk ekspor berbasis sumber daya alam dalam bentuk barang mentah.

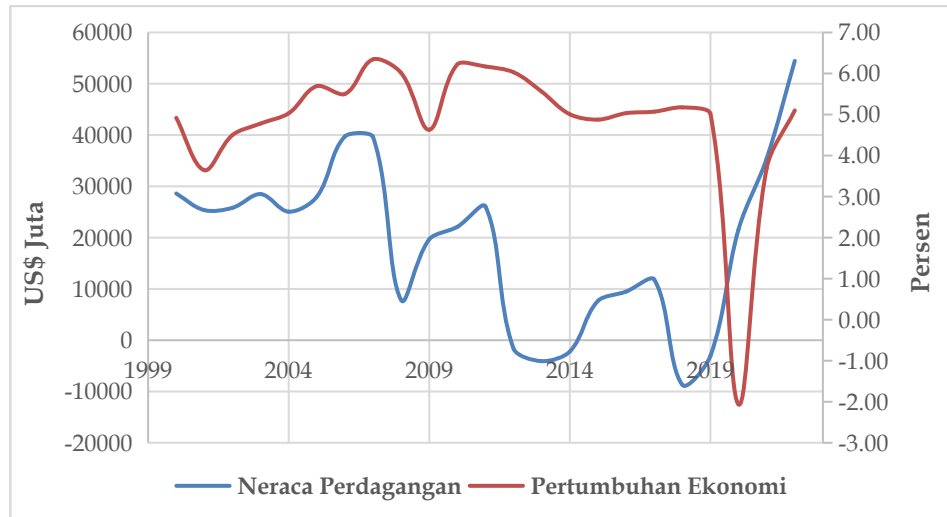
Tahun 2023, beberapa negara di dunia diprediksi akan resesi. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global akibat perang Rusia-Ukraina dan pandemi Covid-19 sepertinya belum akan berakhir. Hal-hal tersebut tentu dapat memengaruhi sustainabilitas surplus NPI pada tahun 2023. Tulisan ini mengkaji upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh Indonesia untuk menjaga sustainabilitas atau keberlanjutan surplus NPI di tahun 2023 dan tahun-tahun mendatang serta mengkaji upaya mengubah struktur ekspor Indonesia.

Upaya Menjaga Sustainabilitas Surplus NPI

Neraca perdagangan adalah salah satu faktor eksternal yang menopang kinerja perekonomian (produk domestik bruto/PDB) Indonesia. Gambar 1 menunjukkan, NPI mempunyai korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Ketika NPI mengalami surplus maka pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, begitu pun sebaliknya. Surplus NPI mempunyai kontribusi positif dalam menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Hal ini yang menyebabkan perekonomian Indonesia mempunyai daya tahan kuat terhadap tekanan global seperti ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina. Oleh karena itu, salah satu upaya menjaga pertumbuhan ekonomi adalah menjaga surplus NPI.

Salah satu upaya menjaga surplus NPI adalah meningkatkan kinerja sektor ekspor. Permintaan impor tidak dapat diturunkan karena lebih dari 75% impor Indonesia adalah golongan bahan baku atau penolong yang banyak digunakan oleh sektor industri manufaktur. Penurunan kinerja impor dapat menekan aktivitas ekonomi riil di dalam negeri sehingga dapat menurunkan tingkat produksi dan perekonomian nasional. Hal yang harus dilakukan adalah mendorong peningkatan kinerja ekspor di atas kinerja impor.

Saat ekonomi dunia masih dilanda ketidakpastian dan prediksi ancaman resesi ekonomi oleh International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, ada dua cara untuk meningkatkan kinerja ekspor dalam rangka mempertahankan surplus NPI tahun 2023 (Media Indonesia, 20 Januari 2023).



Sumber: BPS dan Bank Dunia (2023, data diolah)

Gambar 1. Perkembangan Neraca Perdagangan dan Pertumbuhan Ekonomi Periode 2000-2022

Pertama, Indonesia harus melakukan diversifikasi pasar ekspor. Prediksi ancaman resesi ekonomi yang akan melanda beberapa negara di dunia tahun 2023 tentunya akan menurunkan permintaan global terhadap ekspor Indonesia. Hal ini terjadi seiring prediksi penurunan pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut. Pemerintah harus memetakan negara-negara di dunia yang pertumbuhan ekonominya tetap stabil, atau minimal penurunan

pertumbuhannya tidak signifikan terutama di luar Kawasan Eropa.

Beberapa negara potensial di Benua Asia, Afrika, dan Amerika yang dapat dijadikan sebagai diversifikasi pasar ekspor Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1. Negara-negara ini diprediksi oleh World Economic Outlook (WEO) IMF ekonominya tetap mengalami pertumbuhan pada tahun 2023 walaupun ekonomi dunia masih diselimuti ketidakpastian.

Tabel 1. Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara di Benua Asia, Amerika, dan Afrika Tahun 2023

No.	Amerika		Asia		Afrika	
	Negara	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Negara	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Negara	Pertumbuhan Ekonomi
1.	Panama	4,01	Uzbekistan	4,68	Senegal	8,11
2.	Honduras	3,54	Kazakhstan	4,39	Benin	6,23
3.	Bolivia	3,20	Tajikistan	4,00	Uganda	5,90
4.	Guatemala	3,20	Arab Saudi	3,67	Libya	17,88
5.	Jamaika	3,02	Fiji	6,85	Mesir	4,38
6.	Nikaragua	3,00	Maladewa	6,10	Mali	5,30
7.	Kostarika	2,89	Azerbaijan	2,55	Ethiopia	5,29
8.	Ekuador	2,68			Tanzania	5,17
9.	Peru	2,60				
10.	Kolombia	2,18				

Sumber: World Economic Outlook IMF (2022)

Untuk melakukan perdagangan internasional dengan negara-negara tersebut, Pemerintah Indonesia harus melakukan perjanjian perdagangan dengan negara-negara tersebut baik *government to government* (G2G) atau *business to business* (B2B).

Kedua, Indonesia harus memperkuat *trade intelligence*, khususnya peran atase perdagangan di luar negeri. Setelah identifikasi negara-negara potensial yang dapat dijadikan sebagai diversifikasi pasar ekspor Indonesia, pemetaan terhadap komoditas yang dibutuhkan oleh pasar global harus dilakukan. Hal ini penting untuk dilakukan agar Indonesia bisa memasok komoditas yang langka di negara-negara tersebut. Untuk melakukan pemetaan komoditas tersebut, Indonesia harus memperkuat dan mengoptimalkan peran atase perdagangan di luar negeri. Dari negara-negara di Tabel 1, atase perdagangan dapat memilah jenis-jenis komoditas langka di negara-negara pada Benua Asia, Afrika, dan Amerika. Berdasarkan informasi atase perdagangan tersebut, Pemerintah Indonesia dapat melakukan perjanjian kerja sama perdagangan dengan negara bersangkutan agar bisa mengekspor jenis komoditas tersebut.

Upaya Mengubah Struktur Ekspor Indonesia

Surplus NPI tahun 2023 ditopang oleh kinerja ekspor yang lebih baik dibandingkan kinerja impor. Menjaga sustainability surplus NPI dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi memang diperlukan. Namun, upaya-upaya tersebut harus dilakukan sembari melakukan upaya untuk mengubah struktur ekspor Indonesia. Lebih

dari dua dekade, struktur ekspor Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan. Tiga komoditas yang mendominasi ekspor Indonesia pada periode 2001-2022 meliputi bahan bakar mineral (HS27), lemak dan minyak hewani/nabati (HS15), dan mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS85). Dua komoditas pertama merupakan produk ekspor berbasis sumber daya alam (SDA) dan pertambangan yang mayoritas diekspor dalam bentuk barang mentah.

Berdasarkan data dari *TardeMap* dan BPS, rata-rata ekspor komoditas HS27, HS15, dan HS85 pada periode 2001-2010 masing-masing sebesar 26,25%; 7,69%; dan 7,37%. Pada periode 2011-2022, struktur ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas HS27 sebesar 44,19% (HS27) diikuti oleh komoditas HS15 (20,18%), dan HS85(9,44%). Begitu juga ekspor Indonesia tahun 2021 dan 2022 masih didominasi oleh komoditas HS27 dan HS15 masing-masing sebesar 45,11%; 32,83% (2021); dan 54,98%; 35,20% (2022).

Data Asian Development Bank (ADB) juga menunjukkan bahwa ekspor dalam bentuk barang mentah masih mendominasi ekspor Indonesia. Ekspor komoditas dalam bentuk barang mentah pada tahun 2010 mencapai 59,89%. Angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 64,12% dan 65,72%. Namun, ekspor barang mentah tahun 2021 turun menjadi 63,33% tapi nilainya masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 (ADB, 2022). Jika struktur ekspor pada periode-periode mendatang tidak mengalami perubahan maka Indonesia akan terjebak dalam ekspor bahan mentah atau berbasis SDA yang berkelanjutan.

Salah satu upaya untuk mengubah struktur ekspor Indonesia adalah pengembangan hilirisasi. Implementasi hilirisasi akan memberikan nilai tambah yang besar terhadap berbagai komoditas sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh Indonesia. Apalagi Indonesia memiliki mineral dan potensi sumber energi baru dan energi terbarukan yang besar sebagai unsur pendukung dalam proses hilirisasi. Hilirisasi setidaknya dilakukan pada 6 (enam) sektor prioritas, di luar nikel, yakni (1) mineral, (2) batu bara, (3) minyak bumi, (3) gas alam (LPG), (4) perkebunan, (5) perikanan, dan (6) kehutanan. Rencananya, ada sekitar 21 komoditas dari delapan sektor prioritas tersebut yang masuk ke dalam program hilirisasi (Bisnis Indonesia, 20 Januari 2023; Media Indonesia, 20 Januari 2023).

Namun demikian, implementasi hilirisasi terhadap 21 komoditas tersebut dilakukan secara bertahap dan diprioritaskan untuk komoditas yang sudah berdaya saing. Komoditas tersebut di antaranya nikel, besi dan baja, aluminium (hasil olahan dari bauksit/alumina) dan batu bara untuk produk hasil tambang. Kemudian, produk minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya, ikan olahan, dan rumput laut. Selain komoditas-komoditas tersebut sudah memiliki daya saing, namun komoditas-komoditas tersebut sudah mempunyai basis pengembangan industri hilir yang sudah berjalan dengan baik (Harian Kontan, 20 Januari 2023). Agar hilirisasi tersebut berhasil, pemerintah Indonesia harus menciptakan ekosistem yang kokoh, regulasi yang ramah investasi (*investment friendly*), teknologi yang tepat, dan pasar yang stabil untuk menyerap produk-produk hilir tersebut.

Hilirisasi bertujuan agar komoditas-komoditas tersebut dapat memenuhi kebutuhan rantai pasok

dalam negeri dan global. Dengan begitu, Indonesia akan memiliki daya saing di pasar domestik maupun pasar ekspor dalam jangka panjang. Jika hilirisasi ini sudah dijalankan dan berhasil maka struktur ekspor Indonesia akan mengalami perubahan. Selain struktur ekspor, nilai ekspor Indonesia juga akan mengalami peningkatan. Misalnya hilirisasi nikel yang mampu mendongkrak nilai tambah ekspor nikel hingga berkali-kali lipat. Pada periode 2017-2018, nilai ekspor nikel mencapai hanya sebesar US\$3,3 miliar. Setelah pengembangan hilirisasi nikel, ekspor nikel mencapai US\$20,9 miliar pada tahun 2021. Tahun 2022, Pemerintah Indonesia menargetkan ekspor nikel menjadi US\$29 miliar hingga US\$30 miliar (Tabloid Kontan, 23-28 Januari 2023).

Penutup

Diversifikasi pasar ekspor dan optimalisasi *trade intelligence* merupakan dua dari beberapa strategi untuk menjaga sustainabilitas atau keberlanjutan surplus NPI dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Oleh karenanya, DPR RI terutama Komisi VI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong Kementerian Perdagangan untuk mengimplementasikan kedua langkah tersebut. Implementasi dan optimalisasi kedua langkah tersebut diprediksi akan menjaga surplus NPI pada tahun 2023.

Dalam jangka panjang, hilirisasi merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan nilai ekspor sekaligus mengubah struktur ekspor Indonesia. Namun demikian, hilirisasi ini membutuhkan modal yang besar dan waktu yang

tidak singkat. Mengingat manfaat yang besar dari hilirisasi, DPR RI terutama Komisi VII melalui fungsi pengawasan perlu mendorong Kementerian Perindustrian untuk secepatnya mengimplementasikan hilirisasi terhadap 21 komoditas tersebut untuk tujuan ekspor. Di samping itu, Komisi VII melalui fungsi pengawasan juga perlu mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Perindustrian secara bersamaan untuk mengembangkan dan mendukung keberhasilan proses hilirisasi.

Referensi

Asian Development Bank (ADB). 2022. *Key Indicators for Asia and The Pacific 2022* (53rd ed.). ADB.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2023. Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Desember 2022, *Berita Resmi Statistik*, No. 06/01/Th. XXVI, 16 Januari 2023.

Bank Indonesia (BI). 2023. *Prompt Manufacturing Index (PMI) Triwulan IV-2022*. BI.

“Hilirisasi Industri Dorong Peluang Ekonomi Indonesia”, *Media Indonesia*, 20 Januari 2023, hal. 10.

“Jangan Buru-Buru Hilirisasi 21 Komoditas”, *Tabloid Kontan*, 23-28 Januari 2023, hal. 2.

“Menggapai Energi Hijau Lewat Penghiliran”, *Bisnis Indonesia*, 20 Januari 2023, hal. 4.

“Proyek Hilir Komoditas Harus Bergulir Selektif”, *Harian Kontan*, 20 Januari 2023, hal. 13.



Rasbin
rasbin@dpr.go.id

Dr. Rasbin, S.TP., M.SE., menyelesaikan Pendidikan S1 Teknologi Industri Pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2004, Pendidikan Master Sains (S2) Ilmu Ekonomi di Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 2008. Kemudian meraih gelar Ph.D bidang Ilmu Ekonomi dari universitas yang sama, Universitas Indonesia pada tahun 2020. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “*Real Exchange Rate Misalignments: The Case of The Indonesian Rupiah*” (2021), “*Real Exchange Rate Undervaluation and Indonesia’s Manufacturing Exports*” (2021), “*Desain Keuangan Daerah Setelah Covid-19 di Indonesia: Risiko Fiskal Daerah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19*” (2021), dan “*Telisik Daya Tahan Usaha dan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19: Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Indeks Daya Saing Provinsi Bali: Tinjauan dari Faktor Pasar*” (2021)..

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.